



**LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI
KINERJA**

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2019.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai. Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2019-2023 LKj Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2019-2023).

LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan.

Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 3 indikator kinerja utama, terdapat 3 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif

digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya

Terima kasih,

Sinjai, Februari 2020
Kepala Badan Kab.Sinjai

Drs. BUDIAMAN

Pangkat : Pembina Utama Muda

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah direncanakan pada tahun 2019 telah berhasil dicapai.

3 indikator kinerja sasaran yang realisasinya dibawah 100% yaitu Jumlah Keanggotaan dalam Tim Reaksi Cepat BPBD. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
Isu-isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
Rencana Strategis	12
Rencana Kerja Tahun 2019	14
Perjanjian Kinerja Tahun 2019	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
Capaian Kinerja Organisasi	18
Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019	5
Tabel 2.	Jumlah PNS dan Sukarela Tahun 2019	5
Tabel 3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2019	6
Tabel 4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon Tahun 2019	7
Tabel 5.	Penetapan Kinerja Tahun 2019	17
Tabel 6.	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019	19
Tabel 7.	Perbandingan Target 2018 dan Realisasi Tahun 2019.....	20
Tabel 8.	Perbandingan Target Kinerja Tahun 2019 dengan Target RPJMD	21
Tabel 9.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
Tabel 10.	Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk Negara yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana dan data kejadian bencana menunjukkan peningkatan dalam beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan terus mengembangkan regulasi untuk memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia. Seiring dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan berbagai peraturan teknis di Bidang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum terbentuknya kelembagaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai implementasi amanat undang-undang dan peraturan terkait lainnya, Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Perda ini merupakan dasar hukum terbentuknya Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Sinjai disusul dengan keluarnya Peraturan Bupati Sinjai Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84); Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu perencanaan daerah yang matang. Perencanaan daerah diharapkan mampu memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, akuntabel, relevan dan konsisten dengan rencana lainnya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

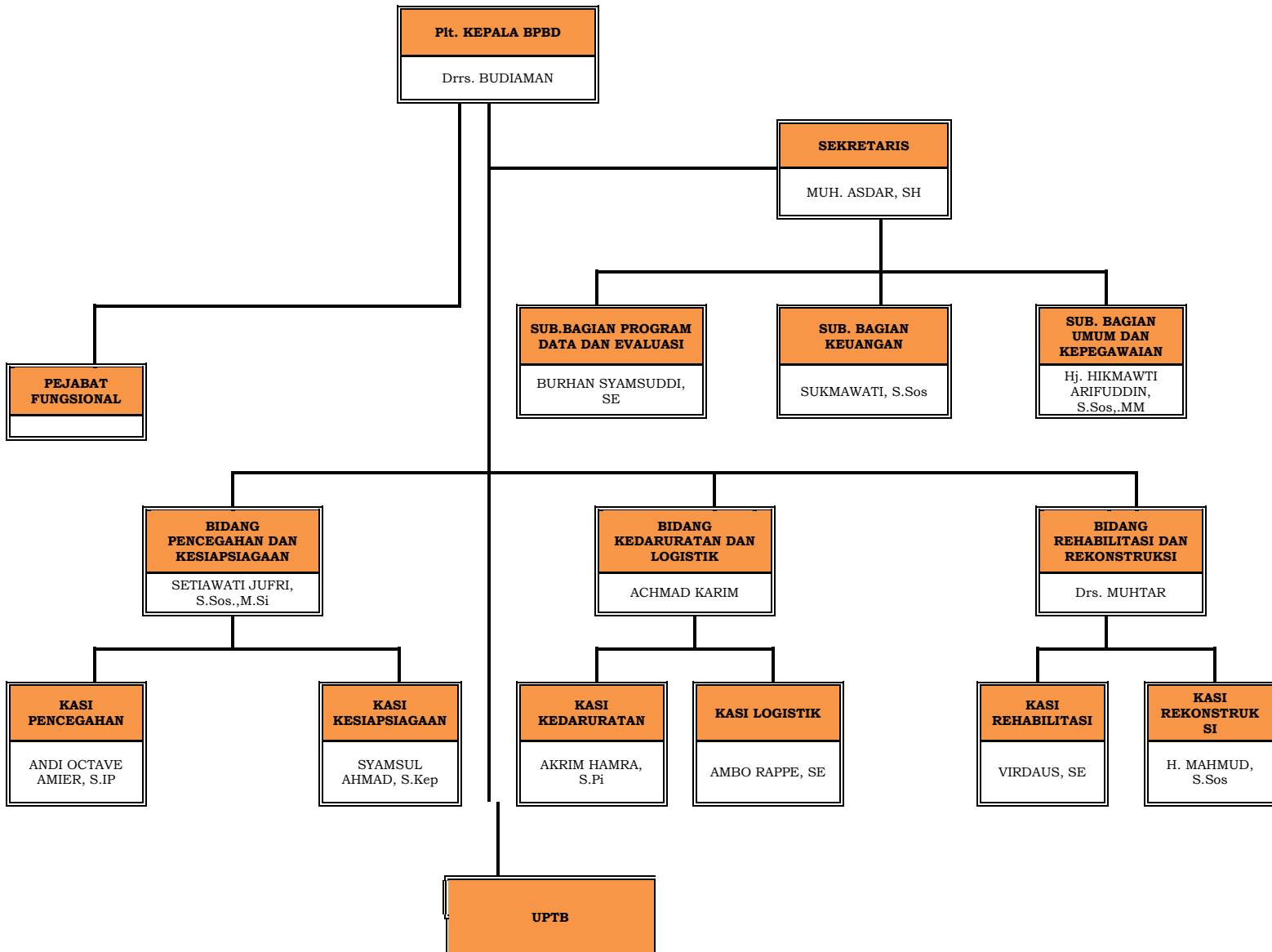
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 84). Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Pelaksanaan tugas sehari-hari dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris Badan membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 1. Seksi Pencegahan
 2. Seksi Kesiapsiagaan
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :
 1. Seksi Kedaruratan
 2. Seksi Logistik
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi :
 1. Seksi Rehabilitasi
 2. Seksi Rekonstruksi
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai didukung dengan 25 orang PNS. Jumlah PNS BPBD Kabupaten Sinjai pada Tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019

	PNS	Jumlah
1	Sekretariat	25
	Jumlah	25

Jumlah pegawai BPBD Kabupaten Sinjai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Jumlah PNS dan PHL Tahun 2019

No	Pendidikan	Status Pendidikan		Jumlah
		PNS	PHL	
1	SD	0	0	0
2	SMP	0	0	0
3	SMA	2	53	55
4	D3	0	0	0
5	S1	21	36	57
6	S2	2	1	3
	Jumlah	25	90	115

Dilihat dari tabel 2. berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai masih kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kebencanaan, mensinergikan

program/ kegiatan baik antara BPBD Kabupaten Sinjai dengan BNPB dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan Jumlah PNS 25 orang. Tingkat pendidikan sebagaimana tabel diatas maka perlu ada penambahan pegawai khususnya yang berstatus sebagai PNS.

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten sinjai berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2019

NO	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	3	12,00
3	Golongan III	20	80,00
4	Golongan IV	2	8,00
Jumlah		25	100

Berdasarkan Tabel 3. Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 3 orang atau 12,00%, Golongan III sebanyak 20 orang atau 80,00% dan Golongan IV sebanyak 2 orang atau 8,00%. Melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD banyak ditempati oleh Golongan III, dan kebanyakan Staf yang bertugas di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai yang telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonering dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon Tahun 2019

NO	Tingkat Eselon	Jumlah	Persentase
1	II.a	0	0
2	II.b	1	7,69
3	III.a	0	0
4	III.b	4	30,76
5	IV.a	8	61,53
6	IV.b	0	0
Jumlah		13	100

Berdasarkan Tabel 4. Pegawai BPBD Kabupaten Sinjai berdasarkan eselon terdiri atas, eselon II.b sebanyak 1 orang atau 7,69% eselon III.b sebanyak 4 orang atau 30,76%, dan eselon IV.a sebanyak 8 orang atau 61,53%.

C. Isu-Isu Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan sebuah SKPD baru. delapan tahun menjalankan fungsi penanggulangan bencana, bisa dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memulai tugas penanggulangan bencana bukan saja dari 0 (nol) tetapi beranjak dari - (minus). Berbagai macam kejadian dan dampak bencana sebelum lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, belum lagi kejadian bencana pasca lahirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sudah sangat menguras berbagai sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai SKPD baru dengan tugas yang demikian berat. Semuanya dijalani dengan *trial* dan *error*. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah:

a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana

- Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsive ke pendekatan preventif.
- Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Sinjai rentan bencana.
- Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan terkait pengurangan resiko bencana.

b. Dalam aspek Kelembagaan

- Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah relative baru berdiri, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.
- Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti: PUSDALOPS.
- Masih adanya program kebencanaan di SKPD lain (overlapping) dan tidak sinkron.

c. Dalam aspek Ketugasan:

- Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada pengecualian.
- Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang mumpuni.
- Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
- Belum ada dukungan sumber daya yang memadai seperti jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dalam melakukan penanggulangan bencana:

1. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsive ke *preventive*, dimana penanggulangan bencana lebih bertitik berat di

dalam perencanaan. Penanggulangan bencana lebih bertitik berat pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana, daripada merespon bencana yang terjadi.

2. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komprehensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara persial dan terpotong-potong. Oleh sebab tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di kabupaten sinjai.
3. Perlunya system penanggulangan bencana yang handal, upaya penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
4. Perlunya kapasitas penanggulangan bencana yang mumpuni. Bencana berdampak besar dilintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang berkaitan dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.

5. Terakhir dan terpenting, Penanggulangan bencana hendaknya dijadikan sebuah dasar dalam pembangunan kabupaten sinjai. Bila melihat rencana pembangunan ke depan, bahwa pusat-pusat pembangunan berada di daerah yang berpotensi terjadi bencana. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2018-2023

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai yang merupakan dokumen rencana strategis dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/ kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu tahun 2018-2023, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka disusunlah skala prioritas dan Rencana Kinerja Tahunan menjadi Penetapan Kinerja (PK).

Renstra digunakan untuk menilai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dalam upaya memenuhi target tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

Perencanaan program dan kegiatan termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Renstra merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi pemerintah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai adalah

“Ketangguhan Sinjai Bersatu Menghadapi Bencana”

Dalam melaksanakan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai maka dijabarkan dalam 3 misi yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari Ancaman Bencana melalui Pengurangan Resiko Bencana di segala aspek.
2. Membangun Sistem dan penguatan kapasitas Penanggulangan Bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antara tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan maka dalam program yang dilakukan ditetapkan indikator kinerja.

1. Penurunan Tingkat Risiko Bencana
2. Pengerahan seluruh potensi yang ada dalam penanganan tanggap darurat bencana
3. Membangun dan Mengembalikan kehidupan masyarakat yang terkena bencana pada tingkat yang wajar dengan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Indikator kinerja utama dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja utama perlu ditetapkan oleh kepala satuan kerja Perangkat daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Secara umum strategi BPBD dalam mencapai visi dan misi, maka diperlukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang menjadi arah pembangunan periode 2018-2023. Mengacu pada sasaran, strategi dan kebijakan BPBD Kabupaten Sinjai, maka sejumlah program yang akan dilaksanakan secara umum terdiri atas program dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

BPBD dalam penyelenggaraan pelayanan kebencanaan dan program rutin yang dilaksanakan pada umumnya oleh SKPD. Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sinjai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Pelaporan Kinerja
3. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana
4. Program Program Logistik dan Tanggap Darurat Bencana
5. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Tabel 5.
Penetapan Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meminimalisir tingkat resiko bencana melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia disetiap sektor	Penurunan tingkat resiko bencana	Memperkecil tingkat resiko terjadinya korban jiwa sampai 80%
2.	Meningkatnya kemampuan stakeholder dalam upaya tanggap darurat bencana melalui pengerahan seluruh sumber daya yang ada	Pengerahan seluruh potensi yang ada dalam penanganan tanggap darurat bencana	80% kejadian bencana pada saat tanggap darurat dapat teratasi
3.	Terlaksananya penanggulangan bencana yang efektif pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Membangun dan mengembalikan kehidupan masyarakat yang terkena bencana pada tingkat yang wajar dengan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi	Berfungsinya kembali kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana pada tingkat yang wajar =80%

Program (a)	Anggaran (b)	Keterangan (c)
1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana	Rp. 20.000.000,-	APBD
2. Program Logistik dan Tanggap Draurat Bencana	Rp. 514.964.028,-	APBD
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Rp. 11.000.000,-	APBD
4. Program Program Pelayanan Perkantoran	Rp. 462.696.798,-	APBD
5. Program Pelaporan Kinerja	Rp. 21.222.088,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Tabel 6.
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1.	Meminimalisir tingkat resiko bencana melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia disetiap sektor	Penurunan tingkat resiko bencana	Memperkecil tingkat resiko terjadinya korban jiwa sampai 80%	Tidak ada resiko bencana yang tidak tertangani (100% tertangani)
2.	Meningkatnya kemampuan stakeholder dalam upaya tanggap darurat bencana melalui pengerahan seluruh sumber daya yang ada	Pengerahan seluruh potensi yang ada dalam penanganan tanggap darurat bencana	80% kejadian bencana pada saat tanggap darurat dapat teratasi	Kejadian pada saat tanggap darurat teratasi (80 % tertangani)
3.	Terlaksananya penanggulangan bencana yang efektif pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Membangun dan mengembalikan kehidupan masyarakat yang terkena bencana pada tingkat yang wajar dengan upaya-upaya rehabilitasi dan rekonstruksi	Berfungsinya kembali kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana pada tingkat yang wajar =80%	Berfungsinya kembali kehidupan masyarakat yg terkena bencana pada tingkat yg wajar =50%

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana terdiri dari kegiatan Pembuatan dan Penempatan rambu-rambu Peringatan pada Daerah Rawan Bencana dimana sasaran strategisnya adalah tersedianya informasi titik Daerah rawan bencana.

Program Logistik dan Tanggap Darurat Bencana terdiri dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Tim Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat dimana sasaran strategisnya adalah Meningkatnya Kemampuan Personil TRC dalam Melakukan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana dan indikator kinerja adalah Jumlah personil yang difasilitasi dalam kaji cepat penanggulangan bencana. Peningkatan Kapasitas Kemampuan Tim Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD sehingga target kinerja kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Tim Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai dengan jumlah anggota 69 orang sehingga realisasi kinerja tahun 2019 pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Tim Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat adalah 100%.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana terdiri dari kegiatan Identifikasi dan Verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk akibat

bencana alam, sasaran strategis yang akan dicapai pada kegiatan Identifikasi dan Verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk akibat bencana alam. Pada tahun 2019 target kinerja pada kegiatan ini adalah 1 Dokumen dan dapat terealisasi sebesar 1 Dokumen artinya kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik ,sehingga realisasi kinerja pada kegiatan ini mencapai 100%.

Tabel 7.

Perbandingan Target 2018 dan Realisasi 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2019
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kerentanan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana	Persentase tingkat kerentanan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana	100%	25%
2	Meningkatnya Kemampuan Personil TRC dalam Melakukan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana	Jumlah personil yang difasilitasi dalam kaji cepat penanggulangan bencana	100%	25%
3	Meningkatnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah bencana yang kembali normal	Tersedianya sarana dan prasarana umum	100%	25%

Tabel 8.

**Perbandingan Target Kinerja Tahun 2019 Dengan Target
RPJMD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Target Jangka Menengah (2019)
1	2	3	4	5
	Meningkatnya kerentanan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana	Persentase tingkat kerentanan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana	100%	25%
1	Meningkatnya Kemampuan Personil TRC dalam Melakukan Kaji Cepat Penanggulangan Bencana	Jumlah personil yang difasilitasi dalam kaji cepat penanggulangan bencana	100%	25%
2	Meningkatnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah bencana yang kembali normal	Tersedianya sarana dan prasarana umum	100%	100%

Program Peningkatan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana terdiri dari kegiatan Pembuatan dan Penempatan Rambu-rambu peringatan pada daerah rawan bencana dimana kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu Pelaksanaan RPJMD sehingga target kinerja kegiatan ini pada tahun awal RPJMD Tahun 2019 adalah 25% dari target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja yang telah ditetapkan adalah 25%.

Program Logistik dan Tanggap Darurat Bencana terdiri dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Tim Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD, sehingga Target kinerja kegiatan pada tahun awal RPJMD Tahun 2019 adalah 25% dari target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja yang telah ditetapkan adalah 25%.

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahap Pasca Bencana terdiri dari kegiatan Identifikasi dan Verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana, kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMD, Sehingga target kinerja kegiatan pada tahun awal RPJMD Tahun 2019 adalah 25% dari target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja yang telah ditetapkan adalah 25%.

B. REALISASI ANGGARAN

Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sinjai pada Tahun Anggaran 2019 telah melaksanakan program kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun besar anggaran belanja baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung (Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal) setelah perubahan adalah sebesar .

Tabel 10.
Laporan Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.780.000,00	8.771.000,00	89,68
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	11.800.000,00	4.272.940,00	36,21
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.736.000,00	1.165.000,00	100
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.273.218,00	2.273.218,00	100
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.160.000,00	5.160.000,00	100
6	Pelayanan Administrasi Kesekretariatan	56.133.955,00	56.067.876,00	98,10
7	Pengelolaan Keuangan SKPD	46.458.750,00	46.240.000,00	99,53

8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	284.205.000,00	284.139.008,00	99,98
9	Penyedia Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) non PNS	8.748.000,00	8.748.000,00	100
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	39.000.000,00	36.893.930,00	94,60
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	8.481.000,00	8.481.000,00	100
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80.250.000,00	80.135.000,00	99,86
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	6.120.000,00	6.120.000,00	100
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8.640.000,00	8.640.000,00	100
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	12.280.000,00	9.420.000,00	76,71
15	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	6.232.628,00	6.167.628,00	98,96
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	14.989.460,00	14.911.960,00	99,48
17	Pembuatan dan Penempatan rambu-rambu peringatan pada daerah bencana	20.000.000,00	20.000.000,00	100
18	Peningkatan kapasitas kemampuan Tim Reaksi Cepat dalam Tanggap Darurat	501.012.603,00	476.412.000,00	95,09

19	Identifikasi dan Verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum, harta dan rumah penduduk akibat bencana alam	19.582.300,00	19.416.150,00	99,15
Jumlah		1.142.882.914,00	1.103.005.710,00	96,51

Dalam pelaksanaan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, ditemukan hambatan atau kendala yang tidak berarti, sehingga pencapaian target dapat terlaksana dengan baik (96,51%). Adapun hambatan atau kendala yang dihadapi, antara lain, dalam penyelesaian perizinan kendaraan Dinas/Operasional, berupa kendaraan dinas roda empat (aset Kemendagri pusat) tidak terbayarkan disebabkan karena adanya syarat administrasi yang tidak terpenuhi, berupa surat rekomendasi dari Kemendagri RI yang menjadi syarat dalam pengurusan STNK.

Berdasarkan data realisasi belanja yang belum maksimal dalam penyerapan anggaran, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan karena masih lemahnya kontrol dan kurang kehati-hatian yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan

- b. Perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik, sehingga di tahun mendatang tidak terjadi lagi penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.

